

LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA REVIU/EVALUASI PENGUKURAN KINERJA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KOTA : PRABUMULIH

SKPD : KECAMATAN PRABUMULIH BARAT

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / Dinas PU
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah <u>rumah</u> ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak ----- Unit. %		Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2016 (minimal per Kecamatan); dan Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah seluruh rumah sd Akhir tahun 2016 (minimal per Kecamatan) sumber data: BPMPTSP / Dinas PU
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / Bappeda
		Peraturan ttg kependudukan	4	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP= orang - Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP per 31/12/2016= orang %		Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016. sumber data: Disdukcapil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp./ Tidak dipungut	Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan besarnya biaya pengurusan KTP dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb.

¹ Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukiman maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
									sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / Disdukcapil
				Pengurusan KTP	Lama pengurusan KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- Hr	Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP.	FC halaman muka (cover), halaman yang menunjukkan lamanya pengurusan KTP dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / Disdukcapil
			6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2016 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2016, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk		Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 2016 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang. sumber data: Kan. Pol PP. Daftar Jumlah penduduk Kab/Kota per 31/12/2016 dari Dukcapil yg ditandatangani oleh pejabat berwenang (minimal per Kecamatan). sumber data: Disdukcapil.
			7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS.	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/ tidak ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan dalam yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / Dinas Sosial
			8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan dalam yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an / DKPP / BLH
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2010,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016.	Tepat / tidak		FC Bukti Penyerahan LPPD 2016 kepada Gubernur. sumber data: Bag. Tapem.
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2016, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal -----	Tepat/ tidak		FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kab/Kota TA 2016 kepada BPK RI sumber data: DPPKAD.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
						2016 - Laporan Kinerja tahun 2016. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016	Tepat/ tidak		Bukti Penyerahan LAKIP Kab/Kota Tahun 2016 kepada Kementerian PAN & RB sumber data: Bag. Organisasi.
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	11	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan ----- Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2016, sebanyak 15 urusan. 1) Urusan Pendidikan, 2) Urusan Bidang Kesehatan, 3) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Urusan Bidang Perumahan, 5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup, 6) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, 7) Urusan Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera, 8) Urusan Bidang Sosial, 9) Urusan Bidang Ketenagakerjaan, 10) Urusan Bidang Kesenian, 11) Urusan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, 12) Urusan Bidang Komunikasi dan informasi, 13) Urusan Bidang Ketahanan Pangan, 14) Urusan Bidang Perhubungan, 15) Urusan Penanaman Modal.	FC Program setiap Urusan yang ada di dalam RPJMD/RKPD.
		Hubungan antar daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2015	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2016, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst--- MOU		FC Daftar MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku pada tahun 2016 yang menunjukkan Nomor dan tanggal MOU, dan pemerintah daerah lain. sumber data: Bag. Hukum dan Perundang-undangan.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas- %		FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2016 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. sumber data: Bappeda.
		Kewenangan	14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = ----- urusan. %	Sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah	FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. Perda pertanggungjawaban APBD 2016 (Terkait Mapping Realisasi Anggaran Per urusan). sumber data: DPPKAD
		Keuangan	15	Waktu penetapan PERDA APBD 2016	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2016. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2016).	Tepat/ tidak	Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2016.	FC halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya Perda Penetapan APBD Murni/Induk TA 2016. sumber data: Bag. Hukun dan per-UU-an. / DPPKAD
			16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/ tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan dalam yang menunjukkan ditandatanganinya perda tsb sumber data: Bag. Hukun dan per-UU-an. / DPPKAD
			17	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ---- 4) Urusan PU Rp. ---- 5) Urusan Sosial Rp. ---- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ---- 7) Urusan Koperasi Rp. ---- 8) Urusan Satpol PP Rp. ---- 9) <u>Urusan Duk & Capil Rp. -----</u> %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. Perda pertanggungjawaban APBD 2016 (Terkait Mapping Realisasi Anggaran Per urusan). sumber data: DPPKAD

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
						Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja, sebesar Rp. -----			
			18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. Urusan Pendidikan Rp. ----- <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. Perda pertanggungjawaban APBD 2016 (Terkait Mapping Realisasi Anggaran Per urusan). sumber data: DPPKAD
		Pelayanan Publik	19	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ---- -- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')	Ada/ tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani perda tsb. sumber data: Bag. Hukun dan per-UU-an.
		Kepegawaian	20	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kota tahun 2016 sebanyak -- ----- orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2016 sebanyak ----- orang-	-----		Daftar Jumlah PNS Per SKPD per 31/12/2016 yg ditandatangani pejabat berwenang. sumber data: BKD Daftar Jumlah penduduk per 31/12/2016 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang. sumber data: Disdukcapil
			21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/ tidak		Print Out dari print screen menu aplikasi simpeg sumber data: BKD
		Kelembagaan	22	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2008	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ----- unit 7) <u>Kecamatan/Distrik</u> = ----- unit Jumlah SKPD = ----- unit	----- unit		FC Perda tentang SOTK sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an. / Bag. Organisasi.

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	23	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA		Daftar Nomor dan Tanggal Perda yang diterbitkan tahun 2016 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	24	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2016	RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak ----- RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak ----- PERDA.	... %		Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang Daftar Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2016 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan th 2016 $\times 100\%$	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak----- keputusan.%		Daftar Keputusan DPRD Tahun 2016 yang ditandatangani pejabat berwenang sumber data: Sekretariat DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Walikota	26	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2016 $\times 100\%$	- Keputusan Walikota tahun 2016, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Walikota tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. %		Daftar Keputusan Walikota Tahun 2016 yang ditandatangani pejabat berwenang sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an
		Tindaklanjuti Peraturan Walikota	27	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikabupaten dalam tahun 2016 $\times 100\%$	- Peraturan Walikota dalam tahun 2016, sebanyak ----- PerWalikota. - Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- PerWalikota. %		Daftar Peraturan Walikota Tahun 2016 yang ditandatangani pejabat berwenang sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi \times 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2016 tentang ----- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2016 tentang ----- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %		Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah (Biro Hukum Prov.) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	29	Keberadaan PERDA/PerWalikota tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerWalikota	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau PerWalikota Nomor Tahun - ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/ tidak		FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukkan ditandatangani perda tsb sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag. humas, leaflet/brosur, radio, dll)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Mediana : ----- - Sebutkan PerWalikota nomor : ---- tahun -----tentang -----.	Ada/ tidak		Print Out Halaman depan Web sumber data: Dishubkominfo FC Perda ttg OPD pada hal untuk bag. Humas dan Protokol sumber data: Bag. Hukum dan Per-uu-an. FC leaflet/brosur sumber data: bag. Humas dan Protokol FC surat ijin penyiapan sumber data: BPMPTSP
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. ----- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2015, baik yang audited atau unaudited. (terkait dana perimbangan). sumber data: DPPKAD
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	32	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2016, sebesar Rp. ----- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. (terkait belanja langsung dan DAU). sumber data: DPPKAD
		Alokasi Belanja pada APBD	33	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp----- - Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. ----- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. (terkait belanja langsung dan jumlah APBD). sumber data: DPPKAD
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. ---- - %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016 baik yang audited atau unaudited. (terkait jumlah PAD dan jumlah APBD). sumber data: DPPKAD

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	35	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: 	Opini tahun 2015 Opini tahun 2016	Opini: WTP/ <i>unqualified opinion</i>); WDP/ <i>qualified opinion</i>); TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda	FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2015 sumber data: DPPKAD/Inspektorat FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2016 sumber data: DPPKAD/Inspektorat
		Besaran SILPA	36	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - SILPA Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. ---- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. (terkait SILPA dan total pendapatan dlm APBD). sumber data: DPPKAD
		Realisasi belanja	37	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. ----- %	Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.	FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. (terkait Realisasi Belanja dan Anggaran dlm APBD). sumber data: DPPKAD
		Pengawasan Inspektorat Kota	38	Rasio Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan Rekomendasi BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi BPK RI sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak - Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2016, sebanyak %	Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi TL sesuai, TL belum sesuai, Belum TL	Hasil rekonsiliasi Inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, dan berapa dari jumlah tersebut yang telah di tindaklanjuti di tahun 2016 sumber data: Inspektorat
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	39	Rasio realisasi PAD 2016 terhadap <u>potensi PAD</u> ⁴	Jumlah realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2016 %		FC Laporan Keuangan Tahun 2015, baik yang audited atau unaudited. (terkait Realisasi PAD). sumber data: DPPKAD FC RPJMD terkait Potensi PAD yang ada dalam RPJMD. sumber data: Bappeda

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan	Dokumen Pendukung / Kertas Kerja
		Peningkatan PAD	40	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2016- PAD 2015) : PAD 2014 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp.---- %		FC Laporan Keuangan Tahun 2016, baik yang audited atau unaudited. (terkait Realisasi PAD). sumber data: DPPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, sebanyak --- -- yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) Dst -----. Penghargaan		FC penghargaan yang diterima Pemerintah Kota dari pemerintah pusat pada tahun 2016 sumber data: Bag. Humas dan Protokol
		Pengadaan barang dan jasa	42	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun --- ---	Ada/ Tidak		Print out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman tandatanganinya perda tentang E-Procurement. sumber data: ULP. / Bag. Pembangunan
		Daya saing daerah	43	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2016	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016, sebanyak ----- ijin	... ijin		Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola urusan penanaman modal PemKab/Kota pada tahun 2016 sumber data: Diskoperindag